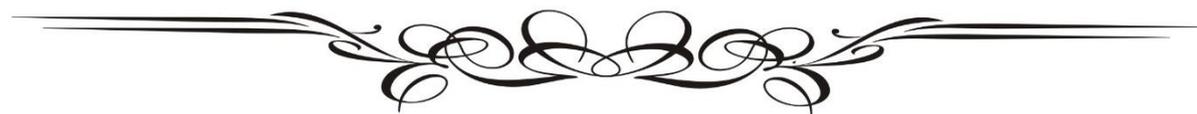


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 29 Mei 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 6)	Rabu, 29 Mei 2019	Berita Foto	Tol Terowongan. Truk melalui terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Sepanjang 5,5 KM ruas tol Cisumdawu siap beroperasi menjelang puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran.
2	Republika (Halaman 22)	Rabu, 29 Mei 2019	Berita Foto	Persiapan Mudik siluet pekerja yang membersihkan terowongan Tol Cisumdawu di Pamulihan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan akan membuka sebagian ruas Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 5 kilometer secara fungsional bagi pemudik yang akan menuju Subang, dan Cirebon via Sumedang Utara.
3	Republika (Halaman 13)	Rabu, 29 Mei 2019	89 PSN Ditargetkan Rampung Kuartal III 2019	Pemerintah menargetkan penyelesaian 89 proyek strategis nasional (PSN) pada akhir kuartal III 2019
4	Republika (Halaman 14)	Rabu, 29 Mei 2019	Pemerintah Bebaskan PPN Rumah untuk MBR	Masyarakat kelompok menengah ke bawah bisa mendapatkan rumah tanpa beban PPN
5	Kompas (Halaman, 12)	Rabu, 29 Mei 2019	Pemindahan Dikaji	Rencana pemindahan ibukota harus dikaji mendalam. Aspek sosial, ekologi, dan bencana mesti menjadi pertimbangan utama. Rencana pemindahkn ibukota dari Jakarta harus dilakukan hari-hati dengan meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Meski relatif aman dari ancaman gempa bumi, Pulau Kalimantan yang menjadi kandidat ibukota baru rentan bencana banjir, kebakaran hutan, dan ada sejarah konflik sosial.
6	Kompas (Halaman Utama)	Rabu, 29 Mei 2019	Skenario untuk atasi Macet	Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Tol Trans-Jawa dan jalur pantai utara Jawa selama masa mudik Lebaran. Puncak kepadatan arus mudik diperkirakan terjadi antara 30 Mei atau enam hari menjelang Lebaran (H-6) dan 2 Juni mendatang (H-3).
7	Media Indonesia (Halaman Utama)	Rabu, 29 Mei 2019	Penerapan Sistem Satu Arah (One way)	Pengamanan di pintu keluar tol Brebes Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperketat pada arus mudik Lebaran 2019. Hal itu mengingat gerbang tersebut menjadi titik ujung dari kebijakan satu arah (one way) yang dijadwalkan pada 30 Mei hingga 2 Juni.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 29 Mei 2019	Menakar Dampak di Bumi Etam	Wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur akan memberi dampak pada perubahan demografi yang berimbas pada terbentuknya pola konsumsi baru dan tumbuhnya sektor ekonomi baru.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 13)	Rabu, 29 Mei 2019	JSMR Kantongi Rp 780 Miliar	PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendapatkan suntikan dana dalam bentuk ekuitas Rp780 miliar dari penerbitan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra dengan underlying saham anak usaha. Pada April 2019, Jasa Marga bersama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) meluncurkan DINFRA Toll Road Mandiri-001. Instrumen itu merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur dalam bentuk ekuitas oleh manajer investasi.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 29 Mei 2019	Lima Bulan, 400.500 Unit terbangun	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir realisasi Program Satu Juta Rumah tahun ini sampai dengan 27 Mei tercatat 400.500 unit.

				Karena itu, kementerian tetap optimistis bahwa program tersebut dapat berjalan dan mencapai target pada tahun ini.
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Rabu, 29 Mei 2019	Mudik dan Euforia Trans-Jawa	Penduduk di Pulau Jawa kini bisa menunaikan tradisi mudik Lebaran lewat jalan tol yang tersambung dari Jakarta ke Surabaya. Waktu tempuh 9 jam kini bukan sebuah kemustahilan. Animo masyarakat untuk menggunakan jalan tol Trans-Jawa sebetulnya sudah terasa sejak tahun lalu. Meski belum seluruhnya tersambung, pemudik bisa melintas di jalan tol yang dibuka secara fungsional. Pelan, tetapi pasti, jalur pantura menjadi nostalgia. Sebaliknya, Trans-Jawa menjadi euforia.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 6)		
Resume	Tol Terowongan. Truk melalui terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Sepanjang 5,5 KM ruas tol Cisumdawu siap beroperasi menjelang puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran.		

TEMPO/PRIMA MULIA



Tol Terowongan. Truk melalui terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Sepanjang 5,5 kilometer ruas tol Cisumdawu siap beroperasi menjelang puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran.

Parameter | Mudik Lebaran

MUDIK lebaran yang tinggal hitungan hari adalah fenomena nasional. Meski para pemudik harus rela berdesak-desakan di transportasi umum atau antre berjam-jam dalam kemacetan, rutinitas tahunan ini tetap dijalani dengan sukacita. Dalam skala nasional, jumlah pemudik bervariasi setiap tahun.



*JUMLAH PEMUDIK DALAM JUTA JIWA

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER IKLAN

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 22)		
Resume	Persiapan Mudik siluet pekerja yang membersihkan terowongan Tol Cisumdawu di Pamulihan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan akan membuka sebagian ruas Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 5 kilometer secara fungsional bagi pemudik yang akan menuju Subang, dan Cirebon via Sumedang Utara.		

RAJAN AL FARIS/ANTARA



PERSIAPAN MUDIK Siluet pekerja yang membersihkan terowongan Tol Cisumdawu di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa [28/5]. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan akan membuka sebagian ruas Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 5 kilometer secara fungsional bagi pemudik yang akan menuju Subang, dan Cirebon via Sumedang Utara.

Judul	89 PSN Ditargetkan Rampung Kuartal III 2019	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 13)		
Resume	Pemerintah menargetkan penyelesaian 89 proyek strategis nasional (PSN) pada akhir kuartal III 2019		

89 PSN Ditargetkan Rampung Kuartal III 2019

JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyelesaian 89 proyek strategis nasional (PSN) pada akhir kuartal III 2019 atau bertepatan dengan akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebanyak 89 proyek tersebut terdiri atas proyek infrastruktur, jaringan telekomunikasi, hingga pembangunan kawasan industri.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, hingga akhir 2018 sebanyak 62 PSN telah diselesaikan dan beroperasi. Selanjutnya, sampai dengan Mei 2019 ini, KPPIP mencatat total sebanyak 77 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia telah dirampungkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 PSN di antaranya dikerjakan dan selesai pada periode Januari-Mei 2019.

"Pada tahun 2019, kita lakukan percepatan proyek strategis nasional dan diharapkan akhir kuartal III (September) nanti, total yang selesai ada sebanyak 89 proyek sehingga ada penambahan 12 proyek yang selesai," kata Wahyu dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (27/5) malam.

Wahyu menjelaskan, ke-12 proyek tersebut hingga saat ini masih dalam tahap konstruksi. Meski begitu, sebagian proyek telah mulai beroperasi dan sebagian lagi akan beroperasi.

Proyek tersebut di antaranya Bandara Sultan Babullah, Bandara Kertajati, LRT Sumatra Selatan, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Palapa Ring Broadband di 57 daerah, dan Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.

Adapun hingga pengujung 2019, Wahyu mengatakan, sedikitnya total PSN yang ditargetkan selesai dan siap beroperasi mencapai 96 proyek. Dengan kata lain, terdapat tambahan tujuh proyek yang rampung selama kuartal IV tahun ini.

Ketujuh proyek tersebut terdiri dari enam proyek jalan tol dan satu proyek bandara dengan nilai investasi sekitar Rp 41,5 miliar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018, total PSN yang direncanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK sejatinya mencapai 223 proyek dan tiga program yang terdiri dari program ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, serta industri pesawat.

PSN yang belum dapat rampung hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK maupun akhir tahun nanti saat ini tengah ada yang memasuki fase konstruksi, transaksi, maupun penyiapan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurrahman mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dioptimalkan untuk menggenjot perbaikan industri manufaktur. Menurut Rizal, diperlukan reorientasi kebijakan pemerintah, yakni mendorong pertumbuhan dengan *supply driven*.

Artinya, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas industri dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada.

"Termasuk mengoptimalkan utilitas berbagai infrastruktur yang sudah dibangun," ujar Rizal.

■ dedy darmawan nasution/adinda pryanka ed: ahmad fikri noor

Judul	Pemerintah Bebaskan PPN Rumah untuk MBR	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 14)		
Resume	Masyarakat kelompok menengah ke bawah bisa mendapatkan rumah tanpa beban PPN		

Pemerintah Bebaskan PPN Rumah untuk MBR

Masyarakat kelompok menengah ke bawah bisa mendapatkan rumah tanpa beban PPN.

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian terkait kategori rumah sederhana dan sangat sederhana yang dapat menikmati fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian itu sebagai upaya revitalisasi sektor perumahan yang terhambat akibat tingginya harga tanah dan bangunan saat ini.

"Kita harapkan, ini akan memunculkan keseimbangan antara *demand* dan *supply* (perumahan)," kata Sri di Jakarta, Selasa (28/5).

Sri menambahkan, penyesuaian yang dilakukan tersebut juga merupakan respons sekaligus evaluasi dalam rangka mendongkrak permintaan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, sektor properti diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sebab, sektor properti, terutama perumahan rakyat, memiliki *multiplier effect* besar.

Itu sebabnya, kata Sri, pemerintah memutuskan untuk menghapuskan PPN bagi rumah-rumah dengan kategori tertentu. Adapun kategori rumah yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 yang telah diundangkan sejak 20 Mei 2019.

"Dengan demikian, masyarakat, terutama kelompok menengah (ke bawah) bisa mendapatkan rumah dengan tidak harus menanggung PPN," ujarnya.

Pemerintah, kata Sri, berharap, kebijakan tersebut akan membantu masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan untuk dapat memiliki rumah. Adapun, terkait rumah yang dibangun di kawasan Jabodetabek, Sri mengatakan, pemerintah akan membahasnya lebih detail.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian aturan terhadap ketentuan batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai. Terdapat lima kriteria untuk rumah yang bisa mendapatkan fa-

silitas tersebut.

Pertama, yakni luas bangunan rumah tidak lebih dari 36 meter persegi. Kedua, harga jual tidak melebihi batasan harga jual. Dengan kata lain, batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian.

Kriteria ketiga yakni, rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi. Orang tersebut termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Keempat, luas tanah tidak kurang dari 60 meter persegi. Kelima, rumah tersebut diperoleh secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun non-subsidi. Termasuk, rumah yang dibiayai dengan mekanisme prinsip syariah.

PMK Nomor 81 Tahun 2019 juga menjelaskan mengenai pondok boro dan asrama mahasiswa serta pelajar yang berhak mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Sementara itu, Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Traghanda mengatakan, butir-butir poin kategori dalam rumah yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sejatinya telah ada

sejak lima tahun yang lalu. Regulasi yang dibuat pemerintah tersebut sebatas untuk memenuhi aspek legal demi memberikan kepastian kepada para perusahaan pengembang properti.

Ali mengatakan, harga-harga produk dalam sektor properti ditentukan setiap satu tahun sekali. Memasuki 2019, pemerintah belum menetapkan harga properti secara resmi, termasuk untuk rumah bersubsidi. Hal itu pun menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha properti sebab khawatir akan terjadi anomali harga properti.

"Jadi, sebetulnya selama tiga bulan terakhir pengembang itu cenderung menahan pembangunan karena menanti regulasi itu," ujarnya.

Adapun dari segi dampak ekonomi, Ali mengatakan, adanya pembebasan PPN yang telah diatur secara tertulis akan memberikan kepastian kepada masyarakat. Diharapkan, hal itu dapat membantu golongan masyarakat yang selama ini mengalami banyak kendala untuk dapat memiliki tempat tinggal.

"Ini pasti akan berdampak karena harganya tentu jadi lebih rendah dan sudah pasti karena ada regulasi," kata Ali.

■ dedy darmawan nasution
edi: ahmad fikri noor

Judul	Pemindahan Dikaji	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman, 12)		
Resume	Rencana pemindahan ibukota harus dikaji mendalam. Aspek sosial, ekologi, dan bencana mesti menjadi pertimbangan utama. Rencana pemindahkn ibukota dari Jakarta harus dilakukan hari-hati dengan meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Meski relatif aman dari ancaman gempa bumi, Pulau Kalimantan yang menjadi kandidat ibukota baru rentan bencana banjir, kebakaran hutan, dan ada sejarah konflik sosial.		

Pemindahan Dikaji

Rencana pemindahan ibu kota harus dikaji mendalam. Aspek sosial, ekologi, dan bencana mesti menjadi pertimbangan utama.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta harus dilakukan hati-hati dengan meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Meski relatif aman dari ancaman gempa bumi, Pulau Kalimantan yang menjadi kandidat ibu kota baru rentan bencana banjir, kebakaran hutan, dan ada sejarah konflik sosial.

Tantangan pemindahan ibu kota itu didiskusikan sejumlah ahli berbagai disiplin ilmu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan LIPI Zainal Arifin mengatakan, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta terjadi sejak masa penjajahan Belanda dan diwacanakan Presiden Soekarno. Dari aspek pemerataan pembangunan dan penduduk, pe-

mindahan itu diperlukan karena hampir 60 persen penduduk Indonesia ada di Jawa.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indraprahasta, menjelaskan, sampai abad ke-17, Jakarta adalah kota pelabuhan dengan penduduk jauh lebih sedikit dibandingkan kota-kota lain, seperti Surabaya dan Semarang. Sejak awal abad ke-20, jumlah warga Jakarta melebihi kota-kota lain.

Hal itu tak diikuti peningkatan infrastruktur pendukung. Perkembangan Jakarta yang melampaui daya dukung lingkungan memicu masalah seperti banjir, penurunan muka air tanah dan daratan.

Pemekaran Jakarta ke sekitarnya menyebabkan area penyangga berebut investasi dengan mengonversi lahan per-

anian. "Pembangunan didominasi di Jawa," katanya.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto menambahkan, Jakarta ada di zona rawan gempa. Sesar darat bisa memicu gempa dan berdampak ke Jakarta tetapi data terbatas. Zona subduksi di selatan Jawa pemicu gempa bisa berdampak hingga Jakarta.

Kalimantan

Namun, Kalimantan yang menjadi kandidat kuat lokasi baru ibu kota rentan bencana. "Di Kalimantan ada sesar, tetapi tak ada data pernah ada gempa besar," kata Eko.

Kalimantan memiliki ancaman bencana lain yang harus dimitigasi, yakni banjir dan kebakaran lahan. "Kalimantan memiliki gambut terluas dengan ketebalan mencapai 20 meter. Lahan gambut ini kaya

air meski kadar asam tinggi dan memicu bencana jika salah kelola. Pemindahan ibu kota jangan memindahkan soal ke tempat baru," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe menegaskan, jika Kalimantan menjadi ibu kota baru, sebaiknya tidak di lahan gambut. Aspek ekologi harus menjadi pertimbangan terkait penurunan keragaman hayati. Kalimantan menghadapi tekanan ekologi seiring pembukaan lahan kelapa sawit dan pertambangan batubara.

Kepala Pusat Penelitian dan Kependudukan LIPI Herry Yogaswara mengingatkan, sejumlah daerah di Kalimantan memiliki sejarah konflik sosial. Untuk memitigasi konflik, pemerintah harus melakukan kajian komprehensif melibatkan intelektual lokal. (AIK)

Judul	Skenario untuk atasi Macet	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Tol Trans-Jawa dan jalur pantai utara Jawa selama masa mudik Lebaran. Puncak kepadatan arus mudik diperkirakan terjadi antara 30 Mei atau enam hari menjelang Lebaran (H-6) dan 2 Juni mendatang (H-3).		

Skenario untuk Atasi Macet

Sejumlah skenario disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Tol Trans-Jawa dan jalur pantai utara. Petugas di lapangan juga diberi kewenangan untuk melakukan rekayasa.



KOMPAS/REBORN SINAGA

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Tol Trans-Jawa dan jalur pantai utara Jawa selama masa mudik Lebaran. Puncak kepadatan arus mudik diperkirakan terjadi antara 30 Mei atau enam hari menjelang Lebaran (H-6) dan 2 Juni mendatang (H-3).

Untuk mengurangi kepadatan di Tol Trans-Jawa, Korps Lalu Lintas Polri memberlakukan sistem satu arah (*one way*) mulai Kilometer 70 Cikampek sampai Kilometer 263 dan sistem lawan arus (*contraflow*) mulai Km 29 hingga Km 61. Skema lalu lintas tersebut diterapkan pada 30 Mei hingga 2 Juni pada pukul 09.00-21.00.

Selain itu, pemerintah juga menambah tempat istirahat di Tol Trans-Jawa dan memberikan diskon tarif di seluruh ruas tol pada 27-29 Mei. Pemerintah juga menerapkan pembatasan kendaraan barang pada 30 Mei hingga 2 Juni.

Jika masih terjadi kemacetan, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri mengatakan, rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat situasional. Hal ini berdasarkan pada kondisi lalu lintas di setiap jalur saat masa mudik dan balik, baik di jalur tol maupun non-tol.

"Ada beragam rekayasa yang bisa diterapkan, misalnya kebijakan untuk jalan terus, pengalihan arus, dan lainnya. Namun, rekayasa tersebut harus disertai dengan rambu dan imbauan yang jelas," kata Refdi sesuai melepas tim

Mudik Gesit Kompas Gramedia 2019, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Berdasarkan pengamatan Kompas, sejumlah titik di Tol Trans-Jawa yang berpotensi terjadi kemacetan adalah Simpang Cikunir di Km 10 karena ada pertemuan arus dari Jalan Tol Lingkar Luar (JORR)

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Skenario untuk Atasi Macet

(Sambungan dari halaman 1)

dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Selain itu, sejumlah titik yang berpotensi terjadi kemacetan adalah Gerbang Tol transaksi, seperti Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, GT Palimanan, GT Kali Kangkung, GT Banyuwani, GT Waru Gunung, dan GT Sidoarjo.

"Ketijakan apa pun di lapangan itu berdasarkan analisis, perencanaan, dan evaluasi. Katakanlah ada kepadatan sepanjang 3-5 kilometer, maka akan kami lakukan *contraflow*. Jika itu tidak bisa mengatasi kemacetan, kami secepatnya *one way* berlaku," kata Refdi.

Selain Simpang Cikunir dan GT transaksi, tempat istirahat atau *rest area* juga diwaspada sebagai titik rawan macet. Di ruas Tol Jakarta-Cikampek, tempat istirahat yang kerap menyebabkan kemacetan ada di Kilometer 19, Km 39, dan Km 57 serta *rest area* di Tol Palikanci.

"Penyebab kemacetan karena kendaraan yang akan masuk *rest area* melebihi kapasitas daya tampung," ujar Manajer Pelayanan Lalu Lintas PT Jasa Marga Cabang Tol Palikanci Agus Hartoyo.

Tempat beristirahat

Pada arus mudik tahun lalu, misalnya, lebih dari 900 kendaraan antri masuk ke area peristirahatan dengan daya tampung 700 kendaraan.

Oleh karena itu, menurut Agus, pihaknya bersama Polri akan membatasi penggunaan tempat istirahat dan memberlakukan sistem buka-tutup. "Kami menginformasikan kepada pengendara agar menggunakan area istirahat maksimal satu jam. Kalau 50 kendaraan sudah keluar, *rest area* akan dibuka lagi," ucap Agus.

Menteri Perhubungan Budi

Karya Sumadi mengungkapkan, ada kekhawatiran pemberlakuan satu arah dari Kilometer 70 hingga Kilometer 263 akan berdampak terhadap kepadatan jalur pantura. Namun, Budi mengatakan jalur pantura dalam keadaan baik sehingga diperkirakan mampu menampung kendaraan pemudik bermotor dan kendaraan yang keluar tol.

Jalur alternatif

Budi Karya memastikan, jika kemacetan terjadi di jalur pantura, pengalihan lalu lintas ke sejumlah jalur alternatif disiapkan. Petugas kepolisian juga disiagakan untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar pasar tumpah. "Strategi di lapangan dinamis sesuai dengan keadaan," ujar Budi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui, ada potensi kemacetan di jalur pantura akibat diberlakukannya sistem satu arah dari Cikampek hingga Brebes. Potensi kepadatan kendaraan dapat terjadi di daerah Palimanan, Losarang, dan Patrol dari arah Brebes menuju Jakarta.

"Kemacetan disebabkan adanya pasar tumpah dan juga kendaraan seperti bus dan truk yang tidak bisa masuk tol karena sistem satu arah. Namun, kemacetan ini tidak akan sampai menghambat kedatangan bus ke Jakarta," ucap Budi.

Terkait dengan kekhawatiran operator bus dengan dampak pemberlakuan *one way* terhadap jalur kedatangan bus ke Jakarta, Kemenhub telah memerintahkan bagi para operator bus agar menyiapkan armada cadangan. "Kami meminta agar setiap operator bisa menyiapkan lima hingga 10 bus cadangan di sejumlah terminal," tutur Budi.

Sebelumnya, Ketua Umum

PB Ikatan Pengusaha Muda Otobus Indonesia Kurnia Lesani Adnan mengatakan, operator bus sudah menyiapkan armada cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan jadwal. Namun, para operator juga meminta pemberlakuan rekayasa lalu lintas untuk bus.

"Kalau bisa ada sistem *contraflow* di jalan tol khusus untuk bus," kata Adnan.

Kepala Kepolisian Resor Cirebon Ajun Komisaris Besar Suhermanto mengatakan, kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif jika jalur pantura di Cirebon macet.

Pasar tumpah

Menurut Suhermanto, pihaknya juga bakal menertibkan pedagang dan penarik becak di sekitar pasar tumpah untuk memperlebar arus mudik. Pasar tumpah tersebut tersebar di Tegalgubug, Palimanan, Weru, Gebang, dan Losari. "Tujuh hari sebelum Lebaran atau tanggal 30 Mei, bahu jalan sudah bersih dari pedagang dan tukang becak," ucap Suhermanto.

Pakar transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono, menilai, potensi kemacetan di jalur pantai utara Jawa pada arus mudik dan balik Lebaran 2019 lebih disebabkan oleh pasar tumpah. Oleh karena itu, pemerintah harus menertibkan sejumlah pasar tumpah yang ada di jalur pantura untuk memperlebar arus lalu lintas.

Sony menilai, pemberlakuan sistem satu arah di Jalan Tol Trans-Jawa tidak akan membuat volume kendaraan di jalur pantura melonjak signifikan. Sebab, pada masa arus mudik, volume kendaraan yang melintas di jalur pantura menuju ke Jakarta tidak terlalu besar.

(SKA/DIV/AIN/DVD/HBS/IKI/XI,SYA/JUM/VIO/MEL/ILO)

Judul	Penerapan Sistem Satu Arah (One way)	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman Utama)		
Resume	Pengamanan di pintu keluar tol Brebes Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperketat pada arus mudik Lebaran 2019. Hal itu mengingat gerbang tersebut menjadi titik ujung dari kebijakan satu arah (one way) yang dijadwalkan pada 30 Mei hingga 2 Juni.		

keamanan dan ketertiban saat Lebaran nanti.

telah Diantisipasi

Penerapan Sistem Satu Arah (One Way)

Skenario

- Kendaraan yang akan menuju Jakarta dari arah Semarang dikeluarkan melalui *exit* Tol Brebes Barat melalui pantura menuju Cirebon hingga Karawang dan masuk kembali ke tol melalui gerbang tol Karawang menuju Jakarta.
- Kendaraan dari Purwokerto menuju Jakarta diarahkan langsung ke pantura lanjut ke Cirebon dan Jakarta.



Arus Mudik

Diberlakukan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah

Waktu penerapan
30 Mei-2 Juni 2019
Pukul 08.00-21.00 WIB



Petugas menata pembatas jalan saat simulasi pemasangan rambu titik berakhirnya jalur satu arah (one way) di ruas tol Km 262 Pejagan-Pemalang, Brebes, Jawa Tengah, kemarin.

Arus balik

Diberlakukan untuk kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta

Waktu penerapan:
7-9 Juni 2019
Pukul 12.00-24.00 WIB



Tips Mudik 2019



Siapkan kondisi fisik



Jangan lupa isi penuh bahan bakar kendaraan



Aktifkan GPS atau bawa peta perjalanan



Periksa kelayakan kendaraan sebelum berkendara



Perhatikan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta disiplin dalam mengemudi



Cek saldo e-toll dan pastikan cukup

Sumber: Korlantas Polri Operasi Ketupat 2019/FOTO: ANTARA

SUPARDJI RASBAN

supardji@mediaindonesia.com

PENGAMANAN di pintu keluar Tol Brebes Barat, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperketat pada arus mudik Lebaran 2019. Hal itu mengingat gerbang tersebut menjadi titik ujung dari kebijakan satu arah (*one way*) yang dijadwalkan pada 30 Mei hingga 2 Juni.

"Berdasarkan pengecekan terakhir, kita sudah siap. Se jauh ini tidak ada kendala," ujar Wakil Kepala Polres Brebes Komisaris M Faizal Perdana se usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2019 di halaman Kantor Polres Brebes, kemarin.

Faizal menuturkan Polres Brebes menerjunkan 450 petugas untuk pengamanan selama musim arus mudik dan balik Lebaran. "Kalau ditambah tim gabungan dari TNI dan bantuan dari Polda Jawa Tengah, semuanya ada

550 personel," terangnya.

Untuk memperlancar arus lalu lintas setelah keluar tol, Pemerintah Kabupaten Brebes akan menghentikan operasional andong dan becak di pasar tumpah. Pemilik andong dan becak akan mendapat kompensasi berupa uang karena tak beroperasi.

"Kompensasi akan diberikan kepada para pemilik andong atau kusirnya dan para abang becak yang biasa beroperasi di Pasar Linggapura," ujar Kasat Lantas Polres Brebes Ajun Komisaris M Adimas.

Pasar Linggapura di Kecamatan Tonjong, Brebes, ialah salah satu pasar tumpah yang diprediksi rawan kemacetan saat musim arus mudik Lebaran. Pasar tradisional tersebut berada di jalur selatan jurusan Brebes-Purwokerto.

Kebijakan satu arah berlaku dari Km 29 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 263 Tol Brebes Barat. Saat sistem itu



diterapkan, PT Jasa Marga akan memberikan perlakuan khusus kepada bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Bus AKAP yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur nantinya dapat masuk ke gerbang Tol Cikampek di Km 72. Mereka akan diberikan satu lajur khusus supaya bisa cepat kembali ke Jakarta untuk mengambil penumpang.

"Kami dapat beberapa masukan sehingga untuk bus kami perlakukan secara khusus. Langkah ini kami koordinasikan dengan Korlantas Polri dan akan kami awasi terus perkembangannya," ujar Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur.

Kapolres Cirebon AKB Suhermanto menyiapkan 36 petugas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di

tol terutama di *rest area*. Petugas itu menggunakan kendaraan roda dua untuk memudahkan pergerakan. "Tim urai itu kita tempatkan di beberapa titik," ujarnya.

Operasi Ketupat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pengamanan Lebaran tahun ini akan lebih kompleks karena bersamaan dengan pelaksanaan proses tahapan Pemilu 2019. Namun, imbuhnya, Polri sudah mengidentifikasi beberapa gangguan yang dinilai dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Di antaranya ialah aksi terorisme, kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat seperti pencurian, perampokan, penjambratan, begal, premanisme, dan lain-lain, aksi intoleransi dan kekerasan, kelancaran dan keselamatan transportasi," ujar Tito dalam sambutan

saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2019 di Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Operasi Ketupat 2019 akan digelar selama 13 hari mulai hari ini hingga 10 Juni 2019 di seluruh daerah. Namun, ada 11 provinsi yang menjadi prioritas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua.

"Operasi akan melibatkan 160.335 personel gabungan, terdiri atas 93.589 personel dari Polri, 13.131 dari TNI, 18.906 personel dari kementerian dan dinas terkait, 11.720 personel satuan kepolisian PP, 6.913 sukarelawan dari Pramuka, serta sukarelawan lain dari organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan sebanyak 16.076 orang," papar Tito. (Pra/UL/Ant/X-10)

Liputan Mudik | Hlm 6

Judul	Menakar Dampak di Bumi Etam	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur akan memberi dampak pada perubahan demografi yang berimbas pada terbentuknya pola konsumsi baru dan tumbuhnya sektor ekonomi baru.		

Menakar Dampak di Bumi Etam

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan memberi dampak pada perubahan demografi yang berimbas pada terbentuknya pola konsumsi baru dan tumbuhnya sektor ekonomi baru.

Gloria F.K.Lawi
gloria.fransisca@bisnis.com

Menurut pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pertama, memperkuat kota yang sudah terbentuk. *Kedua*, membuka lahan baru. Adapun yang menjadi perhatian utama salah satunya adalah ketersediaan anggaran pemerintah jika serius untuk membuka ibu kota baru di Borneo.

"Ada positif dan negatifnya bagi dua opsi ini. Opsi pertama itu lebih hemat secara pembiayaan karena sudah terbentuk ekosistem kotanya. Opsi kedua meski lebih mahal biaya tapi lebih matang perencanaannya, sudah bisa direncanakan yang mana akan jadi sentra pemerintahan, mana pemukiman, dan mana pusat perbelanjaan serta ruang terbuka hijau," tutur Farid kepada *Bisnis*. Selasa (28/5).

Dia mengatakan bahwa

salah satu kawasan yang berada di Kaltim disebut bakal ibu kota adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Farid menilai ada sisi positif dengan mengambil Tahura Bukit Soeharto sebagai ibu kota.

Pertama, selain perencanaan kota lebih matang, *kedua* adalah ini menjadi solusi untuk menuntaskan masalah penebangan liar dan penambangan liar di area tersebut.

Hanya saja, lokasi ini tak ditampik sebagai pusat resapan air. Itulah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat untuk mencegah banjir dan memastikan ketersediaan bahan baku.

"Jadi kalau dibilang ibu kota ke Kalimantan akan mengambil status Kalimantan sebagai paru-paru dunia juga tidak sepenuhnya benar. Lahan yang akan dijadikan ibu kota itu tidak banyak," paparnya.

Farid menyoroti ada beberapa konteks sosial dan ekonomi yang belum banyak dibicarakan publik yakni perubahan struktur demografi di Kalimantan pascapemindahan ibu kota. Dia menuturkan, pembangunan sebuah kota akan mengikuti komposisi penduduk setempat. Maka, dengan pembentukan

ibu kota baru, akan terjadi transmigrasi besar-besaran di Kalimantan.

"Jadi suku yang cukup banyak di Kaltim ini Jawa dan Bugis. Nanti dengan pemindahan ibu kota akan semakin beragam lagi," tuturnya.

Dia berkecukupan kondisi ini sebenarnya bisa diatasi agar tidak terjadi konflik sosial. Farid menilai, Kaltim sebenarnya lebih unggul ketimbang Kalteng karena belum pernah ada konflik sosial.

Menurut Farid, ini karena adaptasi masyarakat Kaltim yang terbuka dan cepat. Namun, selama ini Kaltim juga hanya melalui beberapa proses transmigrasi dari kalangan menengah ke bawah di Jawa ke Bumi Etam.

Ketika salah satu daerah di Kaltim menjadi ibu kota, pemindahan masyarakat yang datang ke Kaltim adalah pendatang dari status sosial kelas menengah ke atas.

"Ini penanganannya pasti akan berbeda nanti. Saat transmigrasi era Soeharto masyarakat kecil ke Kalimantan akan diberikan lahan pekerjaan, rumah, sudah cukup. Permintaan masyarakat saat itu akan berbeda dari masyarakat menengah atas yang nanti akan masuk ke Kalimantan. Perbedaannya permintaan dari struktur demografi yang baru akan membentuk pola ekonomi yang baru," ungkap Farid.

Oleh sebab itu, perencanaan tata kota yang mudah aksesibilitas dan ramah ling-

kungan akan menjadi sorotan dari kalangan menengah atas yang hijrah ke Kalimantan. Untuk menjawab tantangan itu, Farid mengimbau pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk serius mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) asli dari Kalimantan untuk siap bersaing dengan tenaga kerja pendatang.

IMBAS EKONOMI

Ketua DPD Realestat Indonesia (RE) Kaltim, Bagus Susetyo menyatakan wacana pemindahan ibu kota ini memang memberi sentimen positif terhadap bisnis properti di Kaltim. Pasalnya, para investor mulai melirik peluang bisnis properti meski daya beli properti segmen komersial masih rendah di Kaltim.

"Ini [wacana pindah ibu kota] positif ya, orang mulai berani geser investasi ke Kalimantan. Namun, penjualan kita dua tahun ini masih stagnan," papar Bagus.

Meski demikian, wacana ini juga memberi peluang pada terbukanya kenaikan harga lahan di Kaltim akibat ulah spekulasi tanah. Dia juga menilai pentingnya mendorong *public private partnership* (PPP) untuk merealisasikan pemindahan ibu kota.

"Bisa nanti pakai sistem BOT [build-operate-transfer]. Sudah tidak

zaman kalau berpikir lama. Kalau tidak nanti apa yang mau swasta kerjakan?," tuturnya.

Dia berharap investasi yang akan menjamur berkat wacana ini adalah perkembangan industri ritel dan manufaktur. Bagus menilai Kaltim masih perlu mengembangkan ritel untuk menopang sektor tambang yang menjadi primadona di Bumi Etam.

"Selain itu mulai bangun manufaktur, industri hilir. Ada Buluminung, Maloy, Kariangau, tinggal perizinan dan infrastruktur saja," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Agen Travel Indonesia (ASITA) Kalimantan Timur, Syarifuddin Tangalindo menilai dari bisnis pariwisata, wacana pemindahan ibu kota ke Kaltim membawa tantangan bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk membenahi wajah Kaltim. Dia menilai dengan mempercantik tata kota di Kaltim seperti Samarinda, dan lokasi bakal ibu kota, akan menarik lebih banyak pendatang ataupun masyarakat mempromosikan kotanya.

"Jadi orang datang ke Kaltim di jalan saja sudah ingin foto-foto *selfie*. Jadi dalam kerangka berpikir pembangunan itu juga jangan sampai melupakan potensi ekonomi pariwisatanya," papar Syarifuddin. ■



Judul	JSMR Kantongi Rp 780 Miliar	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendapatkan suntikan dana dalam bentuk ekuitas Rp780 miliar dari penerbitan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra dengan underlying saham anak usaha.		

JSMR Kantongi Rp780 Miliar

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendapatkan suntikan dana dalam bentuk ekuitas Rp780 miliar dari penerbitan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK Dinfra dengan *underlying* saham anak usaha.

Pada April 2019, Jasa Marga bersama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) meluncurkan DINFRA Toll Road Mandiri-001. Instrumen itu merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur dalam bentuk ekuitas oleh manajer investasi.

Eka Setya Adrianto, Corporate Finance Group Head Jasa Marga, menuturkan dana yang dihimpun dari Dinfra digunakan untuk berinvestasi di ruas tol Gempol—Pandaan. Jalan tol tersebut dikelola oleh PT Jasa Marga Pandaan Tol (JPT).

Secara detail, Eka mengungkapkan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi menggunakan dua skema. *Pertama*, melalui *rights issue* yang dilakukan oleh JPT sekitar 19% saham.

Dari situ, dana yang masuk ke ekuitas perseoran senilai Rp300 miliar. Selanjutnya, pembelian saham sekitar 33% saham Jasa Marga di JPT

senilai Rp480 miliar.

Jasa Marga telah melakukan penjualan saham perseoran sebanyak 33,11% dari modal ditempatkan di JPT kepada PT Trans Optima Luhur (TOL). Perseoran menjual sekitar 208,64 juta saham dari saham ditempatkan di JPT sehingga TOL kini memegang kepemilikan di JPT.

Dengan demikian, komposisi pemegang saham di JPT usai *rights issue* dan penjualan tersebut yakni Jasa Marga 40%, PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan (JTKP) 6,19%, dan TOL 53,81%.

"[Dengan suntikan ekuitas Rp780 miliar], JPT sudah bisa memperbaiki rasio-rasio keuangannya menjadi lebih baik dan bisa mandiri memenuhi kewajibannya dari pendapatan yang diperoleh," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/5)

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2019, emiten berkode saham JSMR itu mengantongi pendapatan Rp7,63 triliun, turun 20,76% secara tahunan.

Perseoran tol milik negara itu meraih pendapatan tol dan usaha lainnya senilai Rp2,51 triliun dan pendapatan konstruksi Rp5,11 triliun sepanjang Januari—Maret 2019.

Dengan demikian, JSMR mencetak laba bersih Rp584,83 miliar pada kuartal I/2019. Pencapaian tersebut naik 0,32% dari Rp582,98 miliar pada kuartal I/2018. (M. Nurhadi Pratomo)

Judul	Lima Bulan, 400.500 Unit terbangun	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir realisasi Program Satu Juta Rumah tahun ini sampai dengan 27 Mei tercatat 400.500 unit. Karena itu, kementerian tetap optimistis bahwa program tersebut dapat berjalan dan mencapai target pada tahun ini.		

Lima Bulan, 400.500 Unit Terbangun

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir realisasi Program Satu Juta Rumah tahun ini sampai dengan 27 Mei tercatat 400.500 unit.

Karena itu, kementerian tetap optimistis bahwa program tersebut dapat berjalan dan mencapai target pada tahun ini.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menjelaskan bahwa Kementerian PUPR juga tetap optimistis mencapai target pembangunan rumah untuk masyarakat sebanyak 1,25 juta unit tahun ini.

Hal itu didasari pada beberapa hal, seperti telah ditetapkannya harga baru rumah subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasis-

wa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

"Kami optimistis para pengembang juga akan lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat. Apalagi, banyak juga kemudahan perizinan untuk perumahan di daerah," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (28/5).

Target yang ingin dicapai dalam Program Satu Juta Rumah pada dasarnya adalah membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 70% dan sisanya 30% untuk rumah non-MBR.

Dari angka 400.500 unit rumah yang sudah terbangun, rumah yang dibangun untuk MBR mencapai 86% dan 14% adalah rumah non-MBR.

Kemudian, berdasarkan data

yang ada di Ditjen Penyediaan Perumahan, capaian pembangunan perumahan dalam Program Satu Juta Rumah berasal dari beberapa sektor.

Pertama, adalah hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Realisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berjumlah 56.070 unit, sedangkan pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang 285.219 unit.

Realisasi pembangunan rumah oleh pengembang berasal dari skema kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) 37.949 unit. Adapun, pembangunan rumah nonsubsidi yang dibangun pengembang 285.219 unit.

"Selain itu, ada juga rumah

yang dibangun oleh masyarakat sebanyak 2.889 unit. Angka ini akan terus bertambah hingga akhir tahun ini," katanya.

Selanjutnya, pembangunan

rumah non-MBR berasal dari perumahan yang dibangun pengembang 56.232 unit dan rumah yang dibangun sendiri oleh masyarakat sebanyak 90 unit.

"Total pembangunan rumah MBR saat ini sudah sebanyak 344.214 unit dan sisanya 56.322 unit adalah rumah non-MBR," jelasnya. *(Mutlira Nabila)*



PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan bersama ini memanggil serta mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 21 Juni 2019
Waktu Rapat : 14.30 WIB sampai selesai

Judul	Mudik dan Euforia Trans-Jawa	Tanggal	Rabu, 29 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Penduduk di Pulau Jawa kini bisa menunaikan tradisi mudik Lebaran lewat jalan tol yang tersambung dari Jakarta ke Surabaya. Waktu tempuh 9 jam kini bukan sebuah kemustahilan. Animo masyarakat untuk menggunakan jalan tol Trans-Jawa sebetulnya sudah terasa sejak tahun lalu. Meski belum seluruhnya tersambung, pemudik bisa melintas di jalan tol yang dibuka secara fungsional. Pelan, tetapi pasti, jalur pantura menjadi nostalgia. Sebaliknya, Trans-Jawa menjadi euforia.		

Mudik dan Euforia Trans-Jawa

Penduduk di Pulau Jawa kini bisa menunaikan tradisi mudik Lebaran lewat jalan tol yang tersambung dari Jakarta ke Surabaya. Waktu tempuh 9 jam kini bukan sebuah kemustahilan.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Animo masyarakat untuk menggunakan jalan tol Trans-Jawa sebetulnya sudah terasa sejak tahun lalu. Meski belum seluruhnya tersambung, pemudik bisa melintas di jalan tol yang dibuka secara fungsional. Pelan, tetapi pasti, jalur pantura menjadi nostalgia. Sebaliknya, Trans-Jawa menjadi euforia.

Sadar akan animo yang bakal meluap, para pemangku kepentingan, mulai dari regulator dan operator sudah melakukan persiapan sejak dini. Rapat koordinasi terkait dengan penyelenggaraan mudik sudah digelar Januari 2019 atau 6 bulan sebelum pelaksanaan.

Kejadian buruk pada saat angkutan Lebaran pada 2016 tentu tak ingin terulang. Masih segar dalam ingatan, kemacetan panjang di pintu tol Brebes telah menimbulkan korban jiwa. Peristiwa itu lantas dikenang sebagai "Tragedi Brexit".

Sejak 2017–2018, penyelenggaraan mudik mengalami perbaikan, diopang oleh koordinasi antarlembaga yang makin padu dan perbaikan kualitas infrastruktur jalan maupun tambahan kapasitas dari operasional jalan tol baru.

Peningkatan kecepatan dan penurunan jumlah kecelakaan pada mudik 2018 menjadi dua parameter yang harusnya mencetak rapor lebih bagus tahun ini.

Kementerian Perhubungan melansir, kecepatan perjalanan rata-rata arus mudik pada 2018 mencapai 72 kilometer per jam atau naik 9% dibandingkan dengan 2017. Pada arus balik 2018, kecepatan perjalanan rata-rata naik 22%

Arie di Semarang, Selasa (28/5).

Arie menambahkan bahwa JSB menyediakan empat tempat persirahatan dan pelayanan (TIP) di ruas Batang–Semarang. Dia mengimbau agar pengemudi yang kelelahan beristirahat dan tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan.

Secara keseluruhan, Jasa Marga telah menyiapkan total 66 TIP yang tersebar di koridor Trans-Jawa.

Direktur Operasi PT Jasamarga Properti Tita Paulina mengatakan bahwa jumlah TIP yang beroperasi tahun ini bertambah 29. Dari jumlah itu, 18 TIP yang dioperasikan secara penuh dan 11 TIP fungsional. Dia menuturkan bahwa perusahaan akan menerapkan sistem penzonanan dan penyampaian informasi melalui Rest Area Monitoring System (RAMS) guna mengurai potensi kepadatan di sejumlah TIP/TI.

KANTOR PALIKANCI

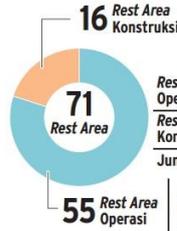
Di samping itu, Kantor Cabang Palikanci juga akan disulap menjadi tempat istirahat untuk mengantisipasi kepadatan di TIP KM207.

Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan bahwa pengguna jalan bisa mengakses Kantor Cabang Palikanci melalui GT Ciperna Timur.

Di kantor yang difungsikan sebagai tempat istirahat itu, terdapat fasilitas SPBU serta rumah makan yang lokasinya sangat dekat dengan Kantor Cabang. "Nantinya pengguna jalan juga dapat melanjutkan kembali perjalanan dengan mengakses gerbang tol yang sama, GT Ciperna Timur," ujarnya.

Di lain pihak, kalangan pengamat menilai persiapan mudik tahun ini lebih memadai dibandingkan dengan tahun lalu. Namun,

Rest Area di Jalan Tol Trans-Jawa



Tipe	Jalur A	Jalur B
Rest Area Operasi	TIP 15	14
Rest Area Konstruksi	TIP 12	13
Jumlah	35	36

Jarak Antar Rest Area	Jalur A	Jalur B
Jarak Rata-rata antar Rest Area	20 km	23 km
Jarak Terjauh antar Rest Area	52 km	

Fasilitas Lainnya



Sumber: BPJT

BISNIS/RADITYO ENO

Fasilitas di Masing-masing TI/TIP Operasi

7–23 Toilet Pria
8–23 Toilet Wanita

60–250 Mobil per TI/TIP*
20–80 Truk per TI/TIP*

*1 Belum termasuk TI Sementara

► TIM MUDIK WASKITA TOLL ROAD



menjadi 79 kilometer per jam.

Di sisi lain, tren kecelakaan melandai. Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah kecelakaan pada saat Operasi Ketupat 2018 (7–15 Juni 2019) turun 17% menjadi 1.154 kasus. Jumlah korban meninggal juga turun 44% menjadi 242 orang.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menjadi pihak yang paling sibuk dalam melayani para pemudik. Badan usaha milik negara itu memang mempunyai hajat besar karena 60% dari konsesi panjang jalan tol di Trans-Jawa dipegang oleh Jasa Marga dan anak usahanya.

Konektivitas jalan tol Trans-Jawa di satu sisi memang akan mempercepat waktu tempuh. Namun, di sisi lain, ketidaksiapan pengemudi dan sarana keselamatan bisa menjadi ranjau yang setiap saat bisa mengundang marabahaya.

Jasa Marga mencatat, sejumlah ruas menjadi lokasi rawan kecelakaan, antara lain Batang–Semarang dan Ngawi–Kertosono. Jasa Marga telah bersiap menambah sarana keselamatan untuk mencegah kecelakaan.

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) dan PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), misalnya, telah membuat pita pengaduh (*rumble stripe*) juga akan dipasang di jalur utama tol dengan jarak sekitar 10 kilometer. Pita juga dipasang 1,50 kilometer sebelum tempat istirahat (*rest area*).

Selain itu, operator juga menambah perambuan, mulai dari batas wilayah, batas kecepatan, menjang tempat istirahat dan awal masuk jalan tol. JNK dan JSB turut menambah sarana keselamatan jalan berupa lampu peringatan dan pagar pembatas (*guard rail*).

Direktur Utama JNK Iwan Moedyarno mengatakan bahwa kecelakaan yang kerap terjadi di ruas Ngawi–Kertosono disebabkan kelalaian pengemudi. Dia mengungkapkan bahwa tol Ngawi–Kertosono terletak di tengah antara koridor barat dan timur jaringan tol Trans-Jawa.

“Di sini titik lelah para pengemudi. [Sebanyak] 70% kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk, lengah, meleng. Seringnya kecelakaan itu tabrak dari belakang,” tutur Iwan di Surabaya, Senin (27/5).

Senada, kecelakaan yang terjadi di ruas Batang–Semarang juga lebih banyak disebabkan faktor kelalaian manusia.

Direktur Utama JSB Arie Irianto mengatakan bahwa sudah ada 18 kasus kecelakaan di jalan tol sepanjang 75 kilometer itu hingga April 2019.

Salah satu insiden melibatkan Bupati Demak Muhammad Natsir di KM 349 pada 2 Februari 2019. Dalam kecelakaan itu, Natsir mengalami luka ringan, sedangkan seorang ajudannya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Arie menerangkan bahwa pengemudi berpeluang besar mengalami kelelahan karena dari Jakarta sudah menempuh enam ruas tol sepanjang lebih dari 300 kilometer.

“*Safety* ini menjadi isu. Oleh karena itu, kami imbau untuk menyiapkan kondisi fisik karena penyebab kecelakaan itu mengantuk dan pecah ban,” kata

kelancaran mudik juga ditentukan kesiapan para pemudik itu sendiri.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai persiapan Jasa Marga dalam mengantisipasi arus mudik maupun arus balik tahun ini lebih matang. Dia menyebutkan bahwa Jasa Marga telah melakukan persiapan yang terperinci pada simpul-simpul kemacetan.

“Namun, perlu juga diantisipasi arus balik yang pergerakannya tidak terencana. Saya lihat dari Surabaya sampai Cirebon, Jasa Marga sudah menyiapkan yang terbaik.”

Secara umum, puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada 31 Mei 2019 (H-5) dan puncak arus balik pada 9 Juni 2019 (H+3).

Jasa Marga memprediksi sebanyak 1,38 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada periode 29 Mei 2019 (H-7) hingga 4 Juni 2019 (H-1).

Dari jumlah tersebut, 58,68% kendaraan menuju ke arah timur (arah Jawa Tengah) melalui jalan tol Jakarta–Cikampek. Sisanya sebanyak 26,68% kendaraan bakal menuju ke arah barat (Merak) melalui jalan tol Jakarta–Tangerang dan 14,64% menuju ke arah selatan (Puncak) melalui jalan tol Jagorawi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai faktor kesiapan pemudik juga akan menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa pemudik perlu terus diingatkan agar mengisi kartu uang elektronik cukup untuk bertransaksi. Pengisian saldo sebaiknya langsung dalam jumlah besar karena batasan saldo sudah mencapai Rp2 juta. Jumlah itu cukup untuk membayar tarif tol terjauh di koridor Trans-Jawa.

Dia menambahkan bahwa euforia yang timbul berkat kehadiran jalan tol rasanya perlu diimbangi dengan kesiapan setiap pihak, baik pengguna maupun operator. Yang juga penting, mudik dengan selamat merupakan keutamaan karena tidak ada euforia seharga dengan nyawa. ■